



PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG
**DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK**

Jalan Firdaus H. Rais No. 63 Singkawang 79151

Laman : www.dinsos.singkawangkota.go.id, Pos-el: dinsospppa@singkawangkota.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN

PERLINDUNGAN ANAK KOTA SINGKAWANG

NOMOR 100.3.3/ 19 /SET.01/2025

TENTANG

DAFTAR INFORMASI PUBLIK DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK KOTA SINGKAWANG

KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN
ANAK KOTA SINGKAWANG

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri, maka perlu diselenggarakan Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang;
- b. bahwa untuk merencanakan, mengorganisasikan dan melaksanakan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi menuju pelayanan informasi yang cepat, mudah dan wajar di lingkungan Pemerintah Kota Singkawang, perlu menetapkan Daftar Informasi Publik Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Singkawang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Singkawang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang pembentukan Kota Singkawang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2001, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4119);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang

- Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 5. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016

tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
11. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);
12. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Keterbukaan Informasi Publik Dalam Penyelenggaraan Pemerintah di Kota Singkawang;
13. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 51) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 82);
14. Peraturan Wali Kota Nomor 125 Tahun 2021 tentang Standar Operasional Prosedur Layanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang (Berita Daerah Kota Singkawang Tahun 2021 Nomor 125);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Daftar Informasi Publik Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Singkawang sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas ini;
- KEDUA : Penetapan Daftar Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU harus berdasarkan pada peraturan perundang-undangan, asas kepatutan dan kepentingan umum;
- KETIGA : Informasi Publik yang wajib disediakan dan diumumkan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA terdiri atas informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala,

wajib disediakan dan diumumkan serta merta, dan informasi yang wajib tersedia setiap saat;

KEEMPAT : Informasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA didasarkan atas pertimbangan peraturan perundang-undangan yang berlaku, asas kepatutan dan asas kepentingan umum serta bersifat ketat dan terbatas.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Singkawang ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Singkawang
pada tanggal 20 Juni 2025
Kepala Dinas,

Utuyarto, S.ST, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19660514 199010 1 001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA SINGKAWANG
NOMOR 100.3.3/19/SET.01 TAHUN 2025
TENTANG
DAFTAR INFORMASI PUBLIK DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA SINGKAWANG
TANGGAL 20 Juni 2025

INFORMASI YANG WAJIB DISEDIAKAN DAN DIUMUMKAN SECARA BERKALA

No.	Ringkasan Isi Informasi		Penanggung Jawab Informasi (Pejabat/Unit/OPD)	Waktu Pembuatan Informasi	Bentuk Informasi Yang Tersedia		Keterangan
					Soft Copy	Hard Copy	
A	Informasi Yang Berkaitan Dengan Badan Publik						
	Mengumumkan informasi berupa deskripsi tentang nama, alamat, struktur organisasi, tugas, fungsi dan kewenangan berdasarkan ketetapan dan peraturan yang berlaku dan disediakan melalui website Badan Publik dan PPID						
1	a	Profil Badan Publik	PPID Pelaksana	Tahun Berjalan (n)	✓	✓	
	Mengumumkan informasi LHKPN Pejabat Daerah yang telah diperiksa, diverifikasi, dan telah dikirimkan oleh KPK untuk disediakan / diumumkan pada website Badan Publik dan PPID (bukan dalam bentuk link KPK) yang terdiri dari:						
2	a	Pejabat Eselon II dan pejabat lain yang disamakan di lingkungan Badan Publik	PPID Pelaksana	Tahun n-1	✓	✓	
	b	Mengumumkan informasi jumlah dan presentase yang wajib LHKSN dalam lingkup Badan Publik (bukan website KPK)	PPID Pelaksana	Tahun n-1	✓	✓	
B	Informasi tentang program dan/atau kegiatan Badan Publik yang bersifat strategis sesuai tugas dan fungsi						
1	Dokumen Rencana Umum Pengadaan (RUP) program atau kegiatan sesuai tugas dan fungsi Badan Publik sebagaimana tercantum dalam SIRUP		PPID Pelaksana	Tahun Berjalan (n)	✓	✓	

2	Mengumumkan program atau kegiatan yang sedang dilaksanakan (Evaluasi RENJA) melalui website Badan Publik dan PPID, sekurang-kurangnya memuat nama program/kegiatan, realisasi anggaran, pencapaian kegiatan	PPID Pelaksana	Tahun Berjalan (n)	✓	✓	
3	Mengumumkan program atau kegiatan yang telah dilaksanakan (LAKIP) melalui website Badan Publik dan PPID, sekurang-kurangnya memuat nama program/kegiatan, realisasi anggaran, pencapaian kegiatan	PPID Pelaksana	Tahun n-1	✓	✓	
4	Rencana Strategik Badan Publik	PPID Pelaksana	Tahun Berjalan (n)	✓	✓	
C	Laporan Keuangan					
	Mengumumkan dalam website Badan Publik dan PPID informasi Laporan Keuangan yang telah diaudit yang terdiri dari:					
1	Laporan Realisasi Anggaran (LRA)	PPID Pelaksana	Tahun n-1	✓	✓	
2	Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK)	PPID Pelaksana	Tahun n-1	✓	✓	
3	Daftar Aset dan Investaris	PPID Pelaksana	Tahun Berjalan (n)	✓	✓	
4	Neraca	PPID Pelaksana	Tahun n-1	✓	✓	
5	Ringkasan RKA OPD	PPID Pelaksana	Tahun Berjalan (n)	✓	✓	
6	Ringkasan DPA OPD	PPID Pelaksana	Tahun Berjalan (n)	✓	✓	
7	Informasi realisasi atau penyerapan anggaran (RFK)	PPID Pelaksana	Tahun Berjalan (n)	✓	✓	
D	Pengadaan Barang dan Jasa					
	Menyediakan Lima (5) dokumen pengadaan barang dan jasa yang telah diaudit/verifikasi					
I	Tahap Perencanaan, meliputi :					
1	Dokumen Rencana Umum Pengadaan (RUP) program atau kegiatan sesuai tugas dan fungsi Badan Publik sebagaimana tercantum dalam SIRUP .	PPID Pelaksana	Tahun n-1	✓	✓	

II	Tahap Pemilihan, meliputi :						
1	Kerangka Acuan Kerja (KAK)	PPID Pelaksana	Tahun n-1	✓	✓		
2	Harga Prakiraan Sendiri (HPS)	PPID Pelaksana	Tahun n-1	✓	✓		
3	Spesifikasi Teknis	PPID Pelaksana	Tahun n-1	✓	✓		
4	Rancangan Kontrak	PPID Pelaksana	Tahun n-1	✓	✓		
5	Dokumen Persyaratan Penyedia atau Lembar Data Kualifikasi	PPID Pelaksana	Tahun n-1	✓	✓		
6	Dokumen Persyaratan Proses Pemilihan atau Lembar Data Pemilihan	PPID Pelaksana	Tahun n-1	✓	✓		
7	Daftar Kuantitas dan Harga	PPID Pelaksana	Tahun n-1	✓	✓		
8	Jadwal pelaksanaan dan data lokasi pekerjaan	PPID Pelaksana	Tahun n-1	✓	✓		
9	Gambar Rancangan Pekerjaan	PPID Pelaksana	Tahun n-1	✓	✓		
10	Dokumen Studi Kelayakan dan Dokumen Lingkungan Hidup, termasuk Analis Mengenai Dampak Lingkungan	PPID Pelaksana	Tahun n-1	✓	✓		
11	Daftar Penawaran Administratif	PPID Pelaksana	Tahun n-1	✓	✓		
12	Surat Penawaran Penyedia	PPID Pelaksana	Tahun n-1	✓	✓		
13	Sertifikat atau Lisensi yang masih berlaku dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	PPID Pelaksana	Tahun n-1	✓	✓		
14	Berita Acara Pemberian Penjelasan	PPID Pelaksana	Tahun n-1	✓	✓		
15	Berita Acara Pengumuman Negosiasi	PPID Pelaksana	Tahun n-1	✓	✓		
16	Berita Acara Sanggah dan Sanggah Banding	PPID Pelaksana	Tahun n-1	✓	✓		
17	Berita Acara Penetapan atau Pengumuman Penyedia	PPID Pelaksana	Tahun n-1	✓	✓		

	18	Laporan Hasil Pemilihan Penyedia	PPID Pelaksana	Tahun n-1	✓	✓	
	19	Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ)	PPID Pelaksana	Tahun n-1	✓	✓	
Menyediakan dokumen Surat-Surat perjanjian dengan pihak ketiga berikut dokumen pendukungnya							
	20	Daftar <i>Momerandum of Understanding</i> (MoU) atau Perjanjian Kerja Sama sesuai tugas dan fungsi Badan Pulik	PPID Pelaksana	Tahun berjalan (n)	✓	✓	
	21	Surat Perjanjian Swakelola	PPID Pelaksana	Tahun berjalan (n)	✓	✓	
	22	Surat Penugasan atau Surat Pembentukan Tim Swakelola	PPID Pelaksana	Tahun berjalan (n)	✓	✓	
III	Tahap Pelaksanaan, meliputi :						
	1	Dokumen Kontrak yang telah ditandatangani beserta Perubahan Kontrak yang tidak mengandung informasi yang dikecualikan	PPID Pelaksana (PPK)	Tahun n-1	✓	✓	
	2	Surat Perintah Mulai Kerja	PPID Pelaksana (PPK)	Tahun n-1	✓	✓	
	3	Surat Jaminan Pelaksanaan	PPID Pelaksana (PPK)	Tahun n-1	✓	✓	
	4	Surat Jaminan Uang Muka	PPID Pelaksana (PPK)	Tahun n-1	✓	✓	
	5	Surat Jaminan Pemeliharaan	PPID Pelaksana (PPK)	Tahun n-1	✓	✓	
	6	Surat Tagihan	PPID Pelaksana (PPK)	Tahun n-1	✓	✓	
	8	Surat Pesanan <i>E-purchasing</i>	PPID Pelaksana (PPK)	Tahun n-1	✓	✓	
	8	Surat Perintah Membayar	PPID Pelaksana (PPK)	Tahun n-1	✓	✓	
	9	Surat Perintah Pencairan Dana	PPID Pelaksana (PPK)	Tahun n-1	✓	✓	
	10	Laporan Pelaksanaan Pekerjaan	PPID Pelaksana (PPK)	Tahun n-1	✓	✓	
	11	Laporan Penyelesaian Pekerjaan	PPID Pelaksana (PPK)	Tahun n-1	✓	✓	

	12	Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan	PPID Pelaksana (PPK)	Tahun n-1	✓	✓	
	13	Berita Acara Serah Terima Sementara atau <i>Provisional Hand Over</i>	PPID Pelaksana (PPK)	Tahun n-1	✓	✓	
	14	Berita Acara Serah Terima atau <i>Final Hand Over</i>	PPID Pelaksana (PPK)	Tahun n-1	✓	✓	
E	Informasi Terbuka Lainnya						
	Mengumumkan Ringkasan Tentang Laporan Akses Informasi Publik (Laporan PPID) yang memuat tentang:						
	1	Jumlah Permintaan Informasi Publik yang diterima	PPID Pelaksana	Tahun berjalan (n)	✓	✓	
	2	Waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap Permintaan Informasi Publik	PPID Pelaksana	Tahun berjalan (n)	✓	✓	
	3	Jumlah Permintaan Informasi Publik yang dikabulkan baik sebagian atau seluruhnya	PPID Pelaksana	Tahun berjalan (n)	✓	✓	
	4	Jumlah Permintaan Informasi Publik yang ditolak beserta alasan penolakan Permintaan Informasi Publik	PPID Pelaksana	Tahun berjalan (n)	✓	✓	
	Mengumumkan Prosedur Pelayanan Akses Informasi Publik yang dapat disediakan berupa Poster/Pengumuman/Infografis						
	5	Tata cara memperoleh informasi publik disertai informasi waktu dan syarat permohonan	PPID Pelaksana	Tahun berjalan (n)	✓	✓	
	6	Tata cara pengajuan keberatan dan proses penyelesaian sengketa informasi publik berikut pihak yang bertanggung jawab	PPID Pelaksana	Tahun berjalan (n)	✓	✓	
	7	Tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran oleh pejabat Badan Publik	PPID Pelaksana	Tahun berjalan (n)	✓	✓	
	8	Tata cara atau prosedur peringatan dini dan prosedur evakuasi keadaan darurat di setiap kantor Badan Publik	PPID Pelaksana	Tahun berjalan (n)	✓	✓	

INFORMASI YANG WAJIB DISEDIAKAN DAN DIUMUMKAN SECARA SETIAP SAAT

No.	Ringkasan Isi Informasi	Penanggung Jawab Informasi (Pejabat/Unit/OPD)	Waktu Pembuatan Informasi	Bentuk Informasi Yang Tersedia		Keterangan
				Soft Copy	Hard Copy	
A	Informasi Tentang Organisasi, Administrasi, Kepegawaian dan Keuangan					
1	Profil pegawai mengenai nama, karir, pendidikan, penghargaan (DUK)	PPID Pelaksana	Tahun berjalan (n)	✓	✓	
2	Data statistik sektoral yang dibuat dan dikelola oleh Badan Publik	PPID Pelaksana	Tahun berjalan (n)	✓	✓	
3	Standar Operasional Prosedur (SOP) yang diberlakukan oleh Badan Publik	PPID Pelaksana	Tahun berjalan (n)	✓	✓	
B	Informasi peraturan, keputusan dan/atau kebijakan yang mengikat publik yang dikeluarkan oleh Badan Publik					
1	Daftar rancangan dan tahap perumusan bagi peraturan, keputusan, dan/atau ketetapan yang sedang dalam proses pembuatan	PPID Pelaksana	Tahun berjalan (n)	✓	✓	
2	Daftar peraturan, keputusan, dan/atau kebijakan yang telah disahkan atau ditetapkan	PPID Pelaksana	Tahun berjalan (n)	✓	✓	
C	Informasi Setiap Saat Lainnya					
1	Menyediakan dokumen pengadaan barang dan jasa yang telah diumumkan dan telah serah terima pekerjaan meliputi:	PPID Pelaksana	Tahun berjalan (n)	✓	✓	

INFORMASI YANG WAJIB DISEDIAKAN DAN DIUMUMKAN SECARA SERTA MERTA

No.	Ringkasan Isi Informasi	Penanggung Jawab Informasi (Pejabat/Unit/OPD)	Waktu Pembuatan Informasi	Bentuk Informasi Yang Tersedia		Keterangan Informasi
				Soft Copy	Hard Copy	
A	Informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum					
	Informasi Tentang Bencana Alam					
1	Informasi tentang rencana gangguan terhadap utilitas publik	PPID Pelaksana	Tahun Berjalan (n)	✓	✓	



Kepala Dinas,

Suliyarto, S.ST, M.Si
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19660514 199010 1 001